

Analisis Perbandingan Sistem Penggajian Berbasis Desktop dan Berbasis Web pada Pengadilan Agama Surabaya

Nanda Eka Puspita¹, Barus Umarella^{2*}

¹Universitas Terbuka, Jakarta, Indonesia

²Politeknik Negeri Ambon, Maluku, Indonesia

*Corresponding author : barus.ahsan@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the payroll system using Web Salary at the Surabaya Religious Court and to analyze whether the payroll accounting system at the Surabaya Religious Court has been implemented effectively and efficiently so that it does not hinder employee performance. Before using Web Salary, the Surabaya Religious Court processed payroll using the GPP (desktop) application. The payroll system process using Web Salary is a transition from using the GPP Application (desktop) so it requires adjustments in the process. The research used by the author is descriptive qualitative research. Meanwhile, data collection techniques use observation, interviews and documentation studies. The research results show that the payroll system using Web Salaries at the Surabaya Religious Court is effective and efficient, and in accordance with the provisions regulated by the government. The Web Salary payroll system is more profitable, because it can be accessed anywhere and anytime. So this can make it easier to process salaries. Apart from that, it can also minimize salary calculation errors, because double checking has been carried out before being submitted to the KPPN. Using Web Salary also minimizes fraud or fraud committed by the financial management department, because each section already has separate user access from the others in processing salary data. This research is useful information for writers and agencies (Surabaya Religious Court employees) regarding the payroll system.

Keywords: Salary, KPPN, Surabaya Religious Court, Web Salary

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penggajian dengan menggunakan Gaji Web di Pengadilan Agama Surabaya dan menganalisis apakah sistem akuntansi penggajian di Pengadilan Agama Surabaya sudah diterapkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menghambat kinerja pegawai. Sebelum menggunakan Gaji Web, Pengadilan Agama Surabaya memproses penggajian menggunakan aplikasi GPP (desktop). Proses sistem penggajian menggunakan Gaji Web adalah transisi dari penggunaan Aplikasi GPP (desktop) sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pengerjaannya. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian dengan menggunakan Gaji Web di Pengadilan Agama Surabaya sudah efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Sistem penggajian Gaji Web lebih menguntungkan, dikarenakan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sehingga hal ini dapat memudahkan dalam pengerjaan gaji. Selain itu juga dapat meminimalisir kesalahan penghitungan gaji, dikarenakan sudah dilakukan pengecekan berganda (double checking) sebelum diajukan ke KPPN. Penggunaan Gaji Web juga meminimalisir adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh bagian pengelola keuangan, dikarenakan setiap bagian sudah memiliki akses user yang terpisah dengan yang lain dalam mengolah data gaji. Penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat bagi penulis dan instansi (pegawai Pengadilan Agama Surabaya) mengenai sistem penggajian.

Kata kunci: Gaji, KPPN, Pengadilan Agama Surabaya, Gaji Web

Introduction

Perusahaan atau instansi pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai keberhasilan tujuan mereka. Dalam konteks instansi pemerintah, penggajian memiliki keterkaitan erat dengan kinerja pegawai. Ketepatan waktu pembayaran gaji dan kesesuaian jumlahnya mampu meningkatkan semangat kerja para pegawai, sehingga tugas serta tanggung jawab dapat diselesaikan secara optimal. Gaji yang dibayarkan biasanya disesuaikan dengan golongan atau jabatan masing-masing pegawai. Penentuan golongan dan jabatan ini tergantung pada tingkat pendidikan saat menjadi pegawai dan lamanya masa kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembayaran gaji dalam instansi pemerintah harus dilakukan secara adil dan layak guna menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kadarisman (2018) mendefinisikan gaji sebagai "salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada pegawai secara periodik" (p.44). Dengan demikian, gaji merupakan upah yang telah diatur oleh perundang-undangan, yang disesuaikan dengan risiko kerja, tingkat pekerjaan, serta tanggung jawab di setiap posisi jabatan.

Penelitian Muhammad Fadli (2022) berjudul *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah* menggunakan metode penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem penggajian di institusi tersebut belum optimal secara keseluruhan, terutama karena adanya perangkapan tanggung jawab di departemen keuangan. Penelitian ini menekankan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek sistem penggajian, mulai dari pencatatan kehadiran hingga fungsi akuntansi.

Penelitian Sinta Nur Azlina (2021) yang berjudul *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Internal pada Dinas Perhubungan Kota Medan* menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pengendalian internal penggajian telah berjalan efektif. Dokumen-dokumen transaksi penggajian tersedia secara komprehensif dan diarsipkan dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi pengendalian internal yang berkaitan dengan proses penggajian di Dinas Perhubungan Kota Medan.

Tri Sri Rejeqi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Boyolali* menggunakan metode studi lapangan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan manajer dan karyawan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di Balai Latihan Kerja Kabupaten Boyolali terbukti efektif. Efektivitas ini terlihat dari fungsionalitas sistem, penerapan dokumen-dokumen akuntansi, serta prosedur penggajian yang terintegrasi dengan aplikasi payroll. Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas dan konsistensi sistem yang digunakan.

Mulatua Silalahi (2019) dalam penelitiannya berjudul *Peranan Sistem*

Informasi Akuntansi Penggajian dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan metode studi dokumentasi. Data yang digunakan sebagian besar berupa data sekunder, seperti visi, misi, serta sistem dan prosedur penggajian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penggajian di dinas tersebut berjalan efektif, mencakup pengendalian internal, perhitungan gaji, dan sistem informasi akuntansi yang diterapkan. Penelitian ini secara khusus menyoroti metodologi perhitungan gaji yang digunakan.

Penelitian Lifry Corry Ertavina (2023) berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara belum optimal, terutama karena terdapat perangkapan tugas di bidang administrasi kepegawaian. Fokus utama penelitian ini adalah evaluasi pengendalian internal terhadap daftar gaji pegawai serta tanggung jawab petugas dalam proses penggajian.

Sistem informasi akuntansi, menurut Mulyani (2016), adalah "sekelompok sub sistem dan komponen yang berinteraksi secara terorganisir untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya." Romney (2015) mendefinisikan sistem sebagai "serangkaian komponen yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang bekerja sama dan terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu." Definisi lain menyebutkan sistem sebagai rangkaian prosedur yang saling terkait dan digabungkan untuk melaksanakan tugas tertentu demi mencapai tujuan (Kamus Teknologi dan Informasi, 2019). Berdasarkan definisi tersebut, sistem dapat disimpulkan sebagai kolaborasi berbagai komponen yang bertujuan menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bodnar & Hopwood (2012) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai "sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang bermanfaat." Sementara itu, Wilkinson (2000) menyatakan bahwa SIA memuat fungsi dan aktivitas akuntansi yang mempertimbangkan dampak sumber daya ekonomi dari peristiwa eksternal atau internal suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan oleh SIA umumnya berhubungan dengan pengolahan transaksi keuangan.

Romney dan Steinbart (2014) mengidentifikasi enam komponen utama dalam Sistem Informasi Akuntansi, yaitu pengguna sistem, instruksi dan prosedur untuk mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data, data yang mencakup semua informasi terkait perusahaan dan core bisnisnya, perangkat lunak untuk pengolahan data, infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat tambahan, dan jaringan komunikasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi integritas data dalam sistem informasi akuntansi. Secara umum, SIA terbagi menjadi lima siklus atau subsistem utama, yaitu Sistem Informasi Pendapatan, Sistem Informasi Pengeluaran, Sistem Informasi Produksi, Sistem Informasi Penggajian/Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Pelaporan.

Sistem penggajian dalam instansi pemerintahan dirancang untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error) atau kecurangan (fraud).

Sistem ini bertujuan agar semua transaksi penggajian dapat dicatat dengan valid, akurat, serta diotorisasi dengan baik sehingga berjalan efektif dan efisien. Pada umumnya, proses penggajian dimulai dari perhitungan daftar hadir pegawai oleh sub bagian kepegawaian. Kemudian, daftar gaji dan pembayaran gaji disusun oleh petugas pengelola gaji, yang dilanjutkan dengan pengiriman slip gaji kepada masing-masing pegawai. Pengadilan Agama Surabaya, sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk menguji, memberikan putusan, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.

Perkara tersebut meliputi isu-isu yang melibatkan individu Muslim, seperti perkawinan, hak waris, wasiat, dan hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Dalam mendukung operasionalnya, sistem penggajian menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada pihak berperkara. Sistem penggajian yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah diperlukan untuk menghindari tindak kecurangan maupun kesalahan administrasi. Gaji Web adalah aplikasi berbasis website yang merupakan pembaruan dari aplikasi GPP berbasis desktop.

Aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai hal baru di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penggajian yang digunakan di Pengadilan Agama Surabaya sekaligus mengkaji implementasi sistem penggajian menggunakan Gaji Web di lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis sebagai tambahan pemahaman tentang tata cara dan struktur penggajian di lembaga pemerintahan, serta bermanfaat bagi instansi sebagai bahan informasi kepada semua pegawai Pengadilan Agama Surabaya mengenai sistem penggajian yang terbaru.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi sistem penggajian di Pengadilan Agama Surabaya secara mendalam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan proses, prosedur, dan sistem yang digunakan secara terperinci. Data yang dikumpulkan mencakup informasi faktual dan narasi yang relevan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi aktual serta potensi perbaikan dalam sistem penggajian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara langsung, observasi, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pegawai yang terlibat dalam proses penggajian untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai prosedur dan tantangan yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan memantau langsung aktivitas administrasi yang berkaitan dengan penggajian guna mengidentifikasi kesesuaian antara praktik dan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, studi literatur mencakup penelaahan dokumen-dokumen resmi, kebijakan terkait, dan referensi akademik untuk memperkaya analisis dengan konteks teori yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Surabaya. Data ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan peluang perbaikan dalam sistem penggajian. Analisis dilakukan dengan

pendekatan sistematis untuk menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi yang relevan. Hasil akhir diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi optimalisasi sistem penggajian, sekaligus menjadi referensi bagi pengadilan atau lembaga lain yang memiliki karakteristik serupa.

Result and Discussions

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Sistem Penggajian adalah salah satu Sistem Informasi Akuntansi. Sistem ini didesain untuk memenuhi peraturan pemerintah dan kebutuhan pihak manajemen. Menurut Steinbart (2016), Siklus penggajian adalah siklus kegiatan bisnis yang berulang dan beroperasi secara operasional dalam pemrosesan data terkait dengan manajemen pegawai, dengan tujuan mengelola pegawai secara efisien. Siklus ini melibatkan tugas-tugas penting seperti perekrutan dan penempatan pegawai baru, pelatihan, penetapan tugas, pemberian kompensasi (gaji), evaluasi kinerja, serta pengakhiran hubungan kerja baik secara sukarela maupun pemutusan hubungan kerja.

Pihak- pihak yang terlibat dalam siklus penggajian, adalah :

- a. Departemen Penggajian, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses siklus penggajian.
- b. Pegawai, sebagai subjek internal perusahaan yang menjadi pencetus terjadinya proses dalam siklus penggajian.
- c. Departemen lain yang bertugas mengumpulkan data aktivitas kerja pegawai.
- d. Institusi lain yang terkait dengan potongan rutin dan kewajiban terkait siklus penggajian.
- e. Sistem terkomputerisasi yang memfasilitasi proses siklus penggajian.
- f. Institusi perbankan yang membantu untuk mentransfer gaji pegawai ke rekening masing-masing pegawai.

Secara umum, proses bisnis siklus penggajian, terdiri dari

- a. Perbarui database utama penggajian.
- b. Perbarui tarif untuk berbagai pemotongan.
- c. Verifikasi data kehadiran dan jam kerja.
- d. Persiapkan proses penggajian.
- e. Lakukan pembayaran gaji.
- f. Hitung tunjangan karyawan dan pajak oleh entitas perusahaan.
- g. Lakukan pengurusan pajak penghasilan dan pemotongan lainnya.
- h. Dokumen terkait dengan siklus penggajian.

Sistem Penggajian dengan Gaji Web

Sistem Elektronik yang digunakan dalam pembayaran gaji pegawai ini merupakan interkoneksi sistem antara SPAN, SAKTI, dan Gaji Web, dan Aplikasi Pendukung yaitu Aplikasi Kepegawaian. Gaji Web adalah aplikasi berbasis website yang digunakan oleh instansi untuk melakukan perhitungan gaji pokok atas Aparatur Sipil Negara yang pembayarannya dibebankan pada anggaran (DIPA) Pemerintah Pusat. Aplikasi ini adalah pengganti dari Aplikasi GPP yang berbasis dekstop. Gaji pokok pegawai merupakan kompensasi yang secara berkala dibayarkan setiap bulan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku dan berlandaskan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup gaji

dasar serta tunjangan yang melekat dengan gaji tersebut.

Elemen-elemen gaji terdiri dari dua komponen utama, yaitu penghasilan dan potongan. Komponen penghasilan mencakup berbagai tunjangan dan gaji pokok yang menjadi hak setiap pegawai. Gaji pokok merupakan elemen dasar dari penghasilan, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai tunjangan tambahan, seperti tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan struktural, dan tunjangan fungsional. Selain itu, terdapat tunjangan umum, tunjangan tambahan umum, tunjangan Papua, dan tunjangan wilayah terpencil yang diberikan berdasarkan lokasi tugas pegawai. Untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, pegawai juga menerima tunjangan beras. Tidak ketinggalan, tunjangan pajak (PPH Pasal 21) dan pembulatan menjadi bagian dari elemen penghasilan.

Di sisi lain, komponen potongan mencakup sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pegawai. Potongan ini meliputi potongan beras, Iuran Wajib Pegawai (IWP), iuran BPJS, dan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21). Selain itu, terdapat potongan untuk sewa rumah, tunggakan yang belum terselesaikan, serta utang lebih yang mungkin dimiliki oleh pegawai. Potongan lain-lain juga dapat berlaku sesuai dengan kebijakan atau perjanjian tertentu. Di samping itu, iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) juga termasuk dalam elemen potongan gaji. Keseluruhan elemen penghasilan dan potongan tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. Penghasilan memberikan kompensasi yang adil dan mendorong kinerja pegawai, sementara potongan memastikan pemenuhan kewajiban administratif dan kesejahteraan jangka panjang melalui berbagai iuran. Dengan demikian, pengelolaan gaji yang sistematis dapat mendukung stabilitas keuangan dan motivasi kerja pegawai secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-7/PB/2023, beberapa pihak yang terlibat dalam proses penggajian mencakup:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk membuat keputusan dan mengelola sebagian tanggung jawab anggaran dalam lingkup Kementerian Negara atau Lembaga.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberikan tanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam hal penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang memiliki wewenang oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam peninjauan permintaan pembayaran dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh PA/KPA untuk mengurus penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban uang dalam pengeluaran Belanja Negara dalam konteks pelaksanaan APBN di instansi.
5. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB) adalah pejabat yang merupakan asisten KPA yang diberikan tanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan Belanja Pegawai.
6. Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) adalah pejabat yang ditugaskan oleh kepala instansi untuk mengelola data kepegawaian dalam Aplikasi

Kepegawaian instansi.

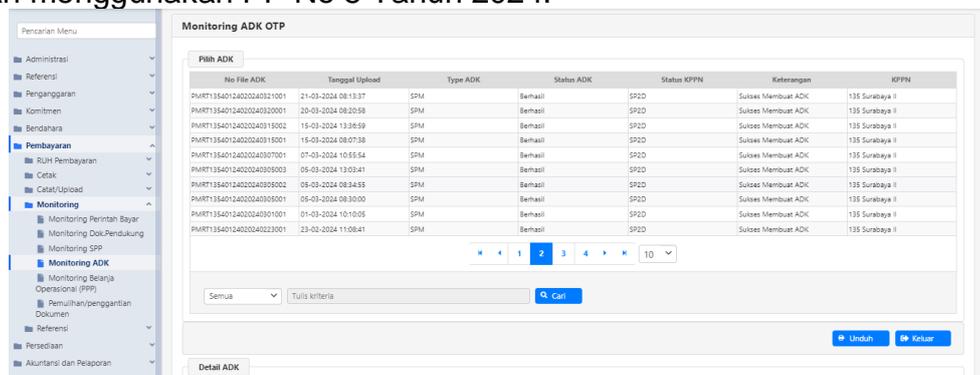
Prosedur pengelolaan Tagihan Gaji berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023 pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Unit kerja atau instansi pemerintahan melaksanakan manajemen administrasi data kepegawaian dengan Aplikasi Kepegawaian.
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian tersebut menghasilkan perubahan data pegawai, yang disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK).
3. PBDK mengeluarkan rangkuman informasi perubahan data pegawai.
4. Informasi perubahan data pegawai dan rangkuman informasi yang dibuat oleh PBDK secara otomatis dikirim ke Aplikasi Gaji Web.
5. PPAB mengeluarkan dan mengirimkan daftar gaji, daftar perubahan data pegawai, dan rangkuman informasi perubahan data pegawai menggunakan Aplikasi Gaji Web kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Daftar gaji ditandatangani secara elektronik oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK.
7. Daftar perubahan data pegawai ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
8. Daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai yang telah ditandatangani secara elektronik diperbarui secara otomatis dalam Aplikasi Gaji Web.
9. Setelah lulus validasi, daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
10. Daftar gaji, daftar perubahan data pegawai, dan rangkuman informasi perubahan data pegawai dikirim secara otomatis dari Aplikasi Gaji Web ke Aplikasi Sistem Administrasi Keuangan dan Tata Usaha Instansi (SAKTI).
11. PPK menerima tagihan elektronik melalui Aplikasi SAKTI berupa daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai.
12. PPK melakukan pengujian terhadap tagihan, termasuk verifikasi data penerima pembayaran gaji dan perhitungan tagihan, serta mempertimbangkan kewajiban pembayaran kepada negara.
13. PPK menyampaikan SPP Gaji Induk secara elektronik kepada PPSM paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan pembayaran gaji untuk Gaji Induk.
14. PPSPM melakukan penelitian dan pengujian elektronik terhadap SPP, termasuk pengecekan pagu anggaran, kesesuaian keluaran, kebenaran administratif, dan kepatuhan terhadap kode akun standar.
15. Penelitian dan pengujian elektronik dilakukan pada Aplikasi SAKTI terhadap data seperti DIPA/POK/RKA Satker, komitmen, dan tagihan.
16. Data dan informasi yang diperiksa mencakup data DIPA/POK/RKA Satker, komitmen, dan tagihan.
17. Jika SPP memenuhi syarat setelah pengujian oleh PPSPM, maka PPSPM menerbitkan dan mengesahkan SPM menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
18. PPSPM mengirimkan SPM Gaji Induk secara elektronik melalui SAKTI ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran gaji

Penerapan prosedur penggajian di Pengadilan Agama Surabaya

Prosedur penggajian di Pengadilan Agama Surabaya dilakukan oleh pengelola keuangan yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya nomor 0199/SEK.PA.W13-A1/SK.KU2/I/2024. Keputusan ini telah direvisi dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023. Petugas yang terlibat mulai dari sub bagian kepegawaian yang bertugas untuk mengelola aplikasi Kepegawaian, operator PPABP, Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPSPM. Kemudian dokumen Surat Perintah Membayar tersebut diajukan ke KPPN untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan gaji pegawai akan ditransfer ke rekening Bank masing-masing. Pengadilan Agama Surabaya bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam proses penggajian. Tugas dan fungsi masing-masing pengelola telah sesuai dengan peraturan dirjen dan tidak ada perangkatan tugas sehingga meminimalisir adanya kesalahan catat.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Keuangan, pengajuan Gaji Induk berjalan dengan baik dan tertib. Hal ini dikarenakan pengajuan gaji di Pengadilan Agama Surabaya dilaksanakan sebelum batas waktu tanggal 15 dan tidak pernah melebihi batas waktu tersebut. Besaran gaji yang diberikan kepada ASN juga telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu dengan menggunakan PP No 5 Tahun 2024.



No File ADK	Tanggal Upload	Type ADK	Status ADK	Status KPPN	Keterangan	KPPN
PMRTY13540134020040310101	21-03-2024 08:13:37	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040320001	20-03-2024 08:20:58	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040319002	15-03-2024 13:36:59	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040319001	15-03-2024 08:07:38	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040307001	07-03-2024 10:55:54	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040305003	05-03-2024 13:03:41	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040305002	05-03-2024 08:34:55	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040305001	05-03-2024 08:30:00	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040301001	01-03-2024 10:10:05	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II
PMRTY13540134020040223001	23-02-2024 11:08:41	SPM	Berhasil	SP2D	Sukses Membuat ADK	135 Surabaya II

Gambar 1 Tampilan Monitoring Aplikasi SAKTI

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa tidak ada status penolakan SP2D pada *monitoring* Aplikasi SAKTI, dan status ADK telah diterima oleh KPPN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengembalian SPM Gaji Induk di tahun 2024 (tahun berjalan), sehingga gaji masing-masing pegawai dapat masuk ke rekening secara otomatis dan tepat waktu. Unsur-unsur penggajian yang terdapat di Pengadilan Agama Surabaya mencakup Gaji Pokok, Tunjangan Pasangan, Tunjangan Anak, Tunjangan Khusus, Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pajak Penghasilan, dan Pembulatan. Selain itu, terdapat juga potongan untuk simpanan wajib (IWP), BPJS, serta pajak penghasilan.

Dokumen yang digunakan dalam proses penggajian meliputi daftar gaji dan rekapan gaji, yang dipersiapkan oleh operator PPABP dan kemudian disetujui secara elektronik oleh bagian Kepegawaian, sebagai dasar untuk proses

pengajuan gaji pada Gaji Web.

DAFTAR GAJI PEGAWAI GOLOONGAN III
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA
SATKER / NOMOR GAJI : 401240 / 000591

MAHKAMAH AGUNG
PEMBAYARAN : BULAN APRIL 2024

LEMBAR KE : 1

NO. URT	NAMA DINISAL LHRH NP STATUS PEGAWAI GOLOONGAN	ETA KAWAN JAWA KAWAN JAWA	Gaji POKOK TUNJUK LUNGGAR A. STRUKTUR B. JAWA	PENGHASILAN					POTONGAN					TANDA TANGAN	
				TUN LUMAH TAMBAH TUNJUK TUNJUK LUNGGAR A. STRUKTUR B. JAWA	TUN JAWA STRUKTUR FUNGSIONAL LANJUTAN PENGHASILAN	TUNJUK BERAS	TUNJUK KULUS PAJAK	Jumlah PENGH KOTOR	POT BERAS	PPK BPJS KESKELAH	Pajak PENGH SUKSES	SEWA RUMAH TUNGGALAN LAINNYA POT. LAIN TUNGGALAN	Jumlah POTONGAN		Jumlah BERSIH YANG DIBAYARKAN
1.			1102												707950477
2.	PNB GOL III		1000												719696607
	NPSPK531832454000														
	Jumlah Lembar ke : 1		2	1	2	5									
	PENGADILAN AGAMA SURABAYA		2	1	2	5									

SURABAYA, 8 Maret 2024
PENGELOLA GAJI/PPASBP

Gambar 2 Daftar Gaji Pegawai

DAFTAR REKAPITULASI GAJI PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

MAHKAMAH AGUNG
PEMBAYARAN : BULAN APRIL 2024

NO. URT	NAMA DINISAL LHRH NP STATUS PEGAWAI GOLOONGAN	ETA KAWAN JAWA KAWAN JAWA	Gaji POKOK TUNJUK LUNGGAR A. STRUKTUR B. JAWA	PENGHASILAN					POTONGAN					TANDA TANGAN	
				TUN LUMAH TAMBAH TUNJUK TUNJUK LUNGGAR A. STRUKTUR B. JAWA	TUN JAWA STRUKTUR FUNGSIONAL LANJUTAN PENGHASILAN	TUNJUK BERAS	TUNJUK KULUS PAJAK	Jumlah PENGH KOTOR	POT BERAS	PPK BPJS KESKELAH	Pajak PENGH SUKSES	SEWA RUMAH TUNGGALAN LAINNYA POT. LAIN TUNGGALAN	Jumlah POTONGAN		Jumlah BERSIH YANG DIBAYARKAN
1	GOLOONGAN I		0												
	GOLOONGAN II		0												
	GOLOONGAN III		2	1	2	5									
	GOLOONGAN IV		8	8	8	8									
	TOTAL		21	8	7	11									

MENGETAHU/MENYETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA PENGELUARAN

SURABAYA, 8 Maret 2024
PENGELOLA GAJI/PPASBP

Gambar 3 Daftar Rekap Gaji Pegawai

Daftar gaji telah diperiksa dengan cermat oleh Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPSPM untuk memastikan keakuratannya. Kemudian, PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Aplikasi SAKTI. SPP ini digunakan untuk mengajukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan di dalam Aplikasi Gaji Web. Selain SPP, ada juga Surat Perintah Membayar (SPM). SPM merupakan dokumen akhir yang dikeluarkan setelah SPP diajukan, dan merupakan dokumen final yang diajukan oleh satuan kerja ke KPPN. Di bawah ini, adalah contoh tampilan halaman pertama SPP dan SPM tagihan Gaji bulan Maret 2024.



Gambar 4 Tampilan SPM dan SPP

Perbandingan prosedur penggajian di Pengadilan Agama Surabaya dengan peraturan keuangan

Tabel 1 Perbandingan Prosedur Penggajian dengan Peraturan Keuangan

No	Pelaksana	Aktivitas	Hasil Penelitian
1	PPABP	Membuat daftar gaji dan rekap gaji Menyampaikan daftar gaji dan rekap gaji pendukung SPP pada Aplikasi SAKTI	Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.
2	PPK	Melakukan pengujian daftar gaji dan rekap gaji pendukung SPP pada Aplikasi SAKTI Menerbitkan dokumen SPP pada Aplikasi SAKTI Menyampaikan dokumen SPP dan dokumen pendukung ke PPSPM	Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.
3	PPSPM	Melakukan pengujian SPP dan dokumen pendukung pada Aplikasi SAKTI	Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.
4	KPPN	Menerbitkan SP2D setelah dilakukan pengujian SPM yang memenuhi syarat.	Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.
5	Bendahara Pengeluaran	Melakukan pembayaran kepada para pegawai melalui rekening pegawai	Sesuai yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2023.

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-7/PB/2023

Bedasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa prosedur penggajian di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-7/PB/2023.

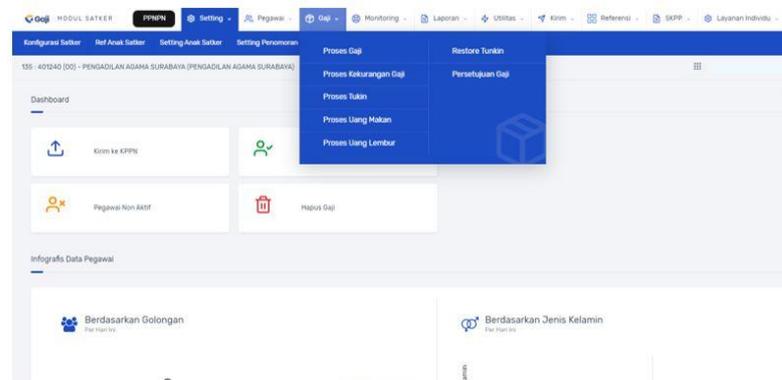
Penerapan sistem Penggajian dengan *Gaji Web* di Pengadilan Agama Surabaya

Keputusan nomor KEP-51/PB/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 16 Mei 2023, menetapkan Tahapan Pelaksanaan Migrasi Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web Tahap II untuk satuan kerja noninterkoneksi. Salah satu hal penting yang disampaikan adalah kewajiban satuan kerja noninterkoneksi dalam lingkup Kementerian/Lembaga untuk melakukan migrasi Aplikasi GPP berbasis Dekstop ke Aplikasi Gaji Web pada periode tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni 2023.

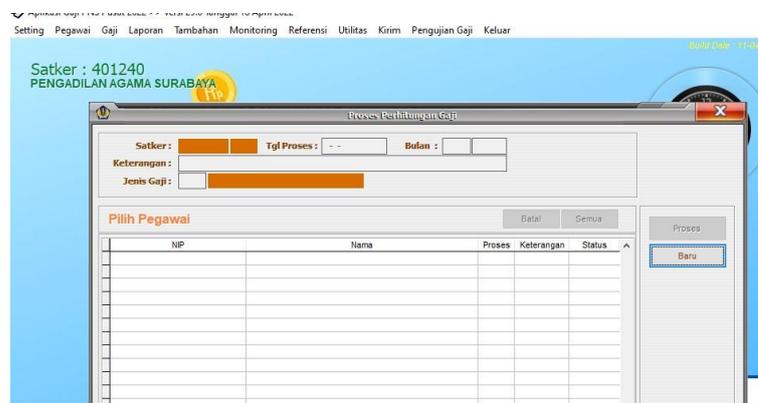
Berdasarkan keputusan tersebut, Pengadilan Agama Surabaya kemudian melakukan migrasi dari Aplikasi GPP berbasis Dekstop ke Aplikasi *Gaji Web* sesuai dengan waktu yang diberikan. Migrasi ini dilakukan secara bertahap oleh operator PPABP.

Perbandingan Aplikasi Web dan GPP (Desktop)

Berikut adalah perbandingan tampilan aplikasi *Gaji Web* dan aplikasi GPP (*desktop*)



Gambar 5 Tampilan Aplikasi Gaji Web



Gambar 6 Tampilan Aplikasi GPP

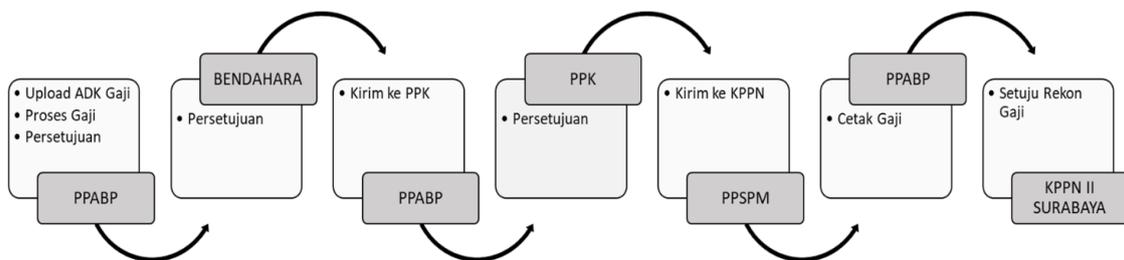
Bedasarkan hasil wawancara dengan operator PPABP, perbedaan penggunaan Aplikasi GPP berbasis Dekstop dan Aplikasi *Gaji Web* antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perbedaan Aplikasi GPP dengan Aplikasi Gaji Web

No	Aplikasi GPP (Dekstop)	Aplikasi Gaji Web
1	Aplikasi GPP hanya digunakan untuk melakukan rekon gaji. Dan untuk penyampaian dokumen (<i>adk</i>) ke KPPN melalui <i>website</i> .	Aplikasi Gaji Web merupakan aplikasi yang menggantikan Aplikasi GPP, dan fitur pada Aplikasi Gaji Web lebih lengkap, dikarenakan tidak hanya berfungsi sebagai rekon gaji, melainkan lebih kompleks. Pada Aplikasi Gaji Web setelah tahapan rekon gaji, masih ada tahapan pengecekan dokumen (<i>adk</i>) gaji yang melibatkan user PPABP, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran. Dan jika sudah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, pengiriman dokumen (<i>adk</i>) ke KPPN dilakukan secara <i>online</i> pada Aplikasi Gaji Web.
2.	Aplikasi GPP memiliki banyak versi, dan setiap ada pembaruan versi harus dilakukan <i>update</i> secara manual.	Aplikasi Gaji Web tidak perlu melakukan <i>update</i> versi secara manual.
3.	Akses Aplikasi GPP terbatas, dikarenakan hanya dapat diakses pada PC/ Laptop yang sudah terinstal aplikasinya.	Aplikasi Gaji Web dapat diakses secara <i>online</i> melalui halaman https://gaji.kemenkeu.go.id/ dimanapun dan kapanpun menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah didaftarkan.

Pada Tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Gaji Web dalam proses penggajian saat ini lebih efektif dan efisien untuk instansi pemerintah. Selain itu, adanya pengecekan terkait dengan dokumen gaji yang dilakukan oleh masing- masing pengelola keuangan, dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) dan kesalahan catat (*human error*).

Secara keseluruhan, langkah-langkah dalam proses pembuatan gaji Induk menggunakan Aplikasi Gaji Web dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 7. Alur sistem penggajian pada Aplikasi Gaji Web

Pengajuan gaji menggunakan Aplikasi Gaji Web di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan prosedur penggajian yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per-7/PB/2023. Dan berdasarkan hasil wawancara

yang telah dilakukan, Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa Informasi Akuntansi telah berkembang secara sistematis, terintegrasi, dan terpusat antara Aplikasi Gaji Web, Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk pengajuan tagihan SPM Gaji, dan OM SPAN yang digunakan untuk memonitoring SP2D gaji yang diterbitkan KPPN. Dengan adanya sistem yang lebih baik, maka pengendalian internal atas pengajuan gaji juga akan semakin baik. Hal ini terlihat saat proses pengajuan dokumen (*adk*) gaji ke KPPN yang membutuhkan persetujuan beberapa *user* pengelola keuangan di Aplikasi Gaji Web. Pengecekan dan persetujuan beberapa *user* ini diharapkan dapat meminimalisir adanya kesalahan catat dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan gaji induk ASN.

Conclusion

Berdasarkan hasil dari penelitian, disimpulkan bahwa implementasi prosedur dan sistem penggajian di Pengadilan Agama Surabaya telah berlangsung secara efektif dan efisien. penggunaan Aplikasi Gaji Web telah diterapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-51/PB/2023 dan menggantikan Aplikasi GPP (desktop). Pengendalian internal terkait dengan sistem penggajian di Pengadilan Agama Surabaya sudah baik, hal ini terlihat pada pemisahan user pengelola keuangan Aplikasi Gaji Web. Selain itu, proses pemeriksaan ganda (*double checking*) pada daftar gaji dan rekap gaji di Aplikasi Gaji Web bertujuan untuk meminimalkan risiko kecurangan (*fraud*) dan kesalahan pencatatan (*human error*).

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Pengadilan Agama Surabaya agar selalu mempertahankan prosedur penggajian secara konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan penggajian. Selain itu, instansi juga harus selalu mengikuti perkembangan peraturan yang ada di lingkup pemerintahan sehingga sistem penggajian tidak akan mengalami kendala pada saat pembuatan tagihan gaji pegawai.

References

- Azlina, Sinta Nur, and Juliana Nasution. 2021. "Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Meningkatkan Pengendalian Internal Pada Dinas Perhubungan Kota Medan." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)* 2(2).
- Corry Ertavina, Lifry et al. 2023. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of The Application Of Paymentaccounting Information System At The National Land Agency Of North Sulawesi Province." *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum* 7(3).
- Enceng, and Suryarama. 2014. *Administrasi Kepegawaian*. Edisi 3. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fadli, Muhammad, Rajindra, and Guasmin. 2022. "Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Payroll Accounting System Analysis at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province." *Jurnal Kolaboratif Sains* 5(1).

- Hanifah, Shofiya, and Muhammad Arif. 2022. "Analisis Efektivitas Sistem Penggajian Karyawan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2(1).
- Kadarisman, Muh. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 2. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai Dan Belanja Operasional Dalam Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Dalam Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran*. Pemerintah. Indonesia. <https://dijpb.kemenkeu.go.id/kppn/metro/id/download/peraturan/3469-per-7-pb-2023-petunjuk-teknis-pelaksanaan-belanja-pegawai-dan-belanja-operasional-dalam-piloting-pembayaran-dalam-rangka-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-melalui-platform->.
- Mulatia, Silalahi. 2019. "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist* 2. <http://methosika.net/index.php/jsika/article/view/32>.
- Mulyani, Sri. 2023. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 3. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Peraturan Pemerintah (PP). 2024. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024>.
- Prabowo, Dory Sukma Wahyu. 2023. *Proses Pembuatan Gaji Induk Pada Aplikasi Gaji Web Satker Ver 2.1*. Kotabumi: KPPN Kotabumi. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/juknis-proses-pembuatan-gaji-induk-pada-aplikasi-gaji-web-4f1e731d/detail/>.
- Romney, Marshall B. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba empat.
- Steinbart. 2016. *Accounting Information System*. 12th ed. London: Pretience Hall.
- Tri Sri Rejeqi, Sekar Aprilia Farkhan, LMS Kristiyanti, and Sumadi. 2023. "Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Boyolali." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 2.